

IN BASKET

PROVINSI BORNEO TENGGARA

PENDAHULUAN

Dalam simulasi ini Anda berperan sebagai Sri Endah Wati, S.E., M.Si dengan jabatan selaku Kepala Bagian Pemerintahan. Terhitung mulai hari ini, pimpinan Anda Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah memasuki masa purna tugas per 1 September 202X. Atas Pertimbangan Sekertaris Daerah, Anda ditugaskan sebagai Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Borneo Tenggara. Saat ini, Anda sendiri sudah mempunyai jadwal kegiatan lain sesuai tugas utama Anda yang harus tetap diikuti dan tidak bisa ditinggalkan. Sebagai Plt Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Anda bertanggung jawab terhadap pemberian saran dan masukan kebijakan serta menindaklanjuti berbagai permasalahan yang ada sesuai kebutuhan.

Hari ini, Rabu 3 September 202X, Anda menerima berkas-berkas berisi informasi yang berasal dari internal maupun eksternal sebagai bahan Anda untuk memahami permasalahan yang ada. Anda sedang berada di ruangan kerja Anda untuk selanjutnya akan menghadiri undangan sosialisasi dari Kemendagri. Anda meluangkan waktu untuk menindaklanjuti berkas-berkas yang terlampir untuk segera ditindaklanjuti. Anda baru akan kembali ke kantor pada pukul 15.00.

Sementara itu, kepala bagian lain sedang melakukan dinas luar daerah, sehingga Anda perlu memberikan arahan secara terperinci, lengkap disertai dengan langkah pelaksanaan tugas.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH PROVINSI BORNEO TENGGARA

Tugas Pokok dan Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

Bagian Pemerintahan terdiri atas :

1. Subbagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas:
2. Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah
3. Subbagian Tata Usaha

Bagian Otonomi Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi Kepala Daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi Kepala Daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi Kepala Daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi Kepala Daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

Bagian **Otonomi Daerah** terdiri atas :

1. Subbagian Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Pemetaan Urusan
3. Subbagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Bagian Kerja Sama mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta/pihak ketiga, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, forum-forum kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta/pihak ketiga serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta/pihak ketiga serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- d. penyiapan, pengoordinasian dan memfasilitasi kerja sama Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan pemerintah daerah negara asing;
- e. penyiapan dan pengelolaan administrasi izin ASN Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, serta pimpinan, anggota DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota ke luar negeri;
- f. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta/pihak ketiga serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

Bagian **Kerja Sama** terdiri atas :

1. Subbagian Kerja Sama Antar Pemerintah
2. Subbagian Kerja Sama Badan Usaha/Swasta
3. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

STRUKTUR ORGANISASI

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH PROVINSI BORNEO TENGGARA



DAFTAR NAMA PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
 PROVINSI BORNEO TENGGARA
 (untuk kalangan terbatas)

NO	NAMA	JABATAN	USIA	PENDIDIKAN
1	-	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-
2	Sri Endah Wati, S.E., M.Si	Kepala Bagian Pemerintahan	53	S2
3	Fahrul Umar, SE, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub koordinator Subbagian Pemerintahan Umum	43	S2
4	Rahman Ardi, S.IP	Analisis Pemerintahan Daerah	45	S1
5	Desta Mustafa	Pengelola Administrasi Pemerintahan	50	SMA
6	Slamet Amiruddin, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub koordinator Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah	47	S1
7	Lia Fitriani	Pengadministrasi Pemerintahan	48	SMA
8	Ari Anwari, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	40	S1
9	Trio Angga Saputra	Pengelola Administrasi Pemerintahan	38	SMA
10	Muh. Agus Fahri, S.E	Kepala Subbagian Tata Usaha	49	S1
11	Rustam	Pengadministrasi Umum	47	SMA
12	Dian Eriana, S.Sos	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	46	S1
13	Zulkifli, A.Md	Bendahara	49	D3
14	Bambang Djulianto. S.IP., M.AP.	Kepala Bagian Otonomi Daerah	51	S2
15	Dra. Dewi Sartika	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Subbagian Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	56	S1
16	Anna Fahlevie, S.S.	Pengadministrasi Otonomi Daerah	50	S1
17	Eddy Perdana, A.Md.	Pengelola Administrasi Pemerintahan	48	D3

18	Mentari Raisya, S.Sos.	Analisis Pemerintahan Daerah	38	S1
19	Drs. Sukamtono	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub koordinator Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Pemetaan Urusan	52	S1
20	Mirza Indri Putri, S.Sos.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	42	S1
21	Benny Rahman, S.T.	Analisis Batas Wilayah	45	S1
22	Rizky Firdaus, A.Md.	Pengadministrasi Otonomi Daerah	35	D3
23	Nuraini Indah, S.IP., M.BA.	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub koordinator Subbagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	46	S2
24	Fahriza Indra, S.S	Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	38	S1
25	Melly Sulstiana	Pengadministrasi Pemerintahan	46	SMA
26	Jhon Barry Siregar, S.Sos.	Kepala Bagian Kerja Sama	49	S1
27	Elly Noviana, S.Sos., M.Hum.	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub koordinator Subbagian Kerja Sama Antar Pemerintah	45	S2
28	Sulistiono, S.Sos.	Analisis Kerjasama	44	S1
29	Ahmad Budiarto, S.Sos.	Analisis Kerjasama	48	S1
30	Andry Nugroho, S.H.	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub koordinator Subbagian Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	48	S1
31	Diah Fizriah, S.E	Analisis Kerjasama	44	S1
32	Muh. Deri Saputra	Pengadministrasi Umum	46	SMA
33	Drs. Irwan Nurcahyo	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub koordinator Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	51	S1
34	Siti Aisyah, S.E.	Analisis Kerjasama	42	S1
35	Rosalina, A.Md.	Pengadministrasi Umum	45	D3



PEMERINTAH PROVINSI BORNEO TENGGARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Rumpu Laut 1 Angin Mamiri
Telepon (0423) 15542 Fax (0423) 568999
Website. www.bkd.borteng.prov.go.id email: bkd@borteng.go

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

Nomor : 600/I.2- 0558 /SETDA

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BORNEO TENGGARA

- Dasar : 1. Surat Edaran Kepala BKN Nomor K.26-30/V.20-3/99 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;
2. Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Borneo Tenggara;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Borneo Tenggara Nomor 882/IV.1-4858/TUUA/BKD/2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : Nama : Sri Endah, S.E.,M.Si
NIP : 197310092002121003
Pangkat/Gol.ruang : Pembina
Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan
- Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal 1 September 20xx di samping jabatannya sebagai Kepala Bagian Pemerintahan juga sebagai Pelaksana Tugas sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

ditetapkan di Borneo,
pada tanggal 1 September 20xx

Sekretaris Daerah
Provinsi Borneo Tenggara,

Ir. Alpha Beta, M.Si
Pembina Utama
NIP.196406271992031004

Tembusan :

1. Gubernur Pem. Prov. Borneo Tenggara (sebagai laporan);



PEMERINTAH PROVINSI BORNEO TENGGARA
SEKRETARIS DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

Jalan Gajah Wong Nomor 13 Angin MamiriTelepon (0423) 54123

Fax. (0423) 54122

Website : www.biropem.borteng.prov.go.id Email: birop@bortengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Plt. Kepala Biro Pemerintahan
Dari : Kasubbag TU
Tanggal : 2 September 202X
Nomor : 085/TU/IX/BPEM/202X
Hal : Laporan Daftar Hadir Pegawai

Sehubungan dengan telah selesainya bulan Agustus 202X, dengan ini kami sampaikan Laporan Daftar Hadir Pegawai Biro Pemerintahan bulan Agustus 202X. Mohon arahan Ibu untuk pegawai yang hadir tidak sesuai dengan ketentuan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kasubbag TU
Biro Pemerintahan,

Muh. Agus Fahri, S.E

NIP. 197109281986091xxx

LAPORAN DAFTAR HADIR BIRO PEMERINTAHAN PROVINSI BORNEO TENGGARA

BULAN AGUSTUS 202X

NO	NAMA	JABATAN	JML HARI KERJA	KETERANGAN						
				TK	S	C	DL	DK	TB	H
1	-	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	20							-
2	Sri Endah Wati, S.E., M.Si	Kepala Bagian Pemerintahan	20							20
3	Fahrul Umar, SE, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub koordinator Subbagian Pemerintahan Umum	20		1					19
4	Rahman Ardi, S.IP	Analisis Pemerintahan Daerah	20							20
5	Desta Mustafa	Pengelola Administrasi Pemerintahan	20							20
6	Slamet Amiruddin, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub koordinator Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah	20					18		2
7	Lia Fitriani	Pengadministrasi Pemerintahan	20			3				17
8	Ari Anwari, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	20							20
9	Trio Angga Saputra	Pengelola Administrasi Pemerintahan	20							20

NO	NAMA	JABATAN	JML HARI KERJA	KETERANGAN						
				TK	S	C	DL	DK	TB	H
10	Muh. Agus Fahri, S.E	Kepala Subbagian Tata Usaha	20							20
11	Rustam	Pengadministrasi Umum	20							20
12	Dian Eriana, S.Sos	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	20							20
13	Zulkifli, A.Md	Bendahara	20							20
14	Bambang Djulianto. S.IP., M.AP.	Kepala Bagian Otonomi Daerah	20				3			17
15	Dra. Dewi Sartika	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Subbagian Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	20				3			17
16	Anna Fahlevie, S.S.	Pengadministrasi Otonomi Daerah	20						20	0
17	Eddy Perdana, A.Md.	Pengelola Administrasi Pemerintahan	20							20
18	Mentari Raisya, S.Sos.	Analisis Pemerintahan Daerah	20				3			17
19	Drs. Sukamtono	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub koordinator Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Pemetaan Urusan	20							20
20	Mirza Indri Putri, S.Sos.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	20							20

NO	NAMA	JABATAN	JML HARI KERJA	KETERANGAN						
				TK	S	C	DL	DK	TB	H
21	Benny Rahman, S.T.	Analisis Batas Wilayah	20							20
22	Rizky Firdaus, A.Md.	Pengadministrasi Otonomi Daerah	20							20
23	Nuraini Indah, S.IP., M.BA.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub koordinator Subbagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	20							20
24	Fahriza Indra, S.S	Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	20							20
25	Melly Sulstiana	Pengadministrasi Pemerintahan	20							20
26	Jhon Barry Siregar, S.Sos.	Kepala Bagian Kerja Sama	20			9				11
27	Elly Noviana, S.Sos., M.Hum.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub koordinator Subbagian Kerja Sama Antar Pemerintah	20							20
28	Sulistiono, S.Sos.	Analisis Kerjasama	20							20
29	Ahmad Budiarto, S.Sos.	Analisis Kerjasama	20	7		4			7	2
30	Andry Nugroho, S.H.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub koordinator Subbagian Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	20							20
31	Diah Fizriah, S.E	Analisis Kerjasama	20							20

NO	NAMA	JABATAN	JML HARI KERJA	KETERANGAN						
				TK	S	C	DL	DK	TB	H
32	Muh. Deri Saputra	Pengadministrasi Umum	20							20
33	Drs. Irwan Nurcahyo	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub koordinator Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	20							20
34	Siti Aisyah, S.E.	Analisis Kerjasama	20							20
35	Rosalina, A.Md.	Pengadministrasi Umum	20							20

KETERANGAN:

- TK : TANPA KETERANGAN
- S : SAKIT
- C : CUTI
- DL : DINAS LUAR
- DK : DIKLAT
- TB : TERLAMBAT
- H : HADIR

Kasubbag TU
Biro Pemerintahan,



Muh. Agus Fahri, S.E

NIP. 197109281986091xxx



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PEMERINTAH PROVINSI BORNEO TENGGARA**

Jalan Rumput Laut 1 Angin Mamiri Telepon (0423)

12345 Fax. ((0423) 34567

Website: www.bpsdm.borteng.prov.go.id Email : bpsdm@borteng.go.id

Bernaung, 1 September 20XX

Kepada Yth.

Nomor : 800/566 /IX/20XX

Perihal : Diklat Kompetensi

Lampiran : 4 lembar

Kepala Biro Pemerintahan Provinsi

Borneo Tenggara

di Bernaung

Berdasarkan hasil penilaian kompetensi dan potensi yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 20XX oleh UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai BKD Provinsi Borneo Tenggara, kami telah memetakan kompetensi dan potensi pegawai di Lingkungan Biro Pemerintahan Provinsi Borneo Tenggara. Hasil penilaian ini juga kami sandingkan dengan hasil kinerja pegawai yang bersangkutan. Kami bermaksud menawarkan diklat pengembangan kepada pegawai (daftar terlampir).

Pengusulan nama peserta diklat, diterima paling lambat pada bulan September 20XX minggu ke 2. Untuk keterangan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, BPSDM Provinsi Borneo Tenggara, melalui narahubung, Saudara Kalia HP/WA 081489017675.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA,

MALAYA PARIS, M.M.

196709131985032003

Tembusan:

1. Kepala BKD Provinsi Borneo Tenggara

LAMPIRAN 1
Hasil penilaian kompetensi dan penilaian kinerja

NO	NAMA	Jabatan	Kerjasama	Pengembangan Diri	Pelayanan Publik	Pengambilan Keputusan	Perekat Bangsa	TOTAL KOMPETENSI	STANDAR	HASIL KINERJA 20XX-1 (1-100)
1	Rahman Ardi, S.IP	Analisis Pemerintahan Daerah	0.75	0.75	0.75	0.25	0.75	3.25	5	86
2	Desta Mustafa	Pengelola Administrasi Pemerintahan	1	1	1	1	1	5	5	87
3	Lia Fitriani	Pengadministrasi Pemerintahan	2	2	2	2	1.75	9.75	5	87
4	Ari Anwari, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	0.25	0.25	0.75	0.75	0.25	2.25	5	85
5	Trio Angga Saputra	Pengelola Administrasi Pemerintahan	1	0.75	0.75	1	0.75	4.25	5	84
6	Rustam	Pengadministrasi Umum	1	1	1	1.25	1	5.25	5	90
7	Dian Eriana, S.Sos	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	0.25	0.25	0.75	0.75	1	3	5	79
8	Zulkifli, A.Md	Penata Keuangan	0.75	0.75	0.75	0.25	0.75	3.25	5	81
9	Anna Fahlevie, S.S.	Pengadministrasi Otonomi Daerah	1	0.75	1	1	1	4.75	5	88
10	Eddy Perdana, A.Md.	Pengelola Administrasi Pemerintahan	1	1	1	0.75	1	4.75	5	
11	Mentari Raisya, S.Sos.	Analisis Pemerintahan Daerah	1	1.25	1.25	1	1	5.5	5	84
12	Mirza Indri Putri, S.Sos.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1	0.75	1	1	1	4.75	5	84
13	Benny Rahman, S.T.	Analisis Batas Wilayah	1.25	1	1.25	1	1	5.5	5	82
14	Rizky Firdaus, A.Md.	Pengadministrasi Otonomi Daerah	1	1	1.25	1	1	5.25	5	82
15	Melly Sulstiana	Pengadministrasi Pemerintahan	1	0.75	1.25	1	1	5	5	84
16	Sulistiono, S.Sos.	Analisis Kerjasama	0.75	0.75	0.75	1	0.75	4	5	80
17	Ahmad Budiarto, S.Sos.	Analisis Kerjasama	TIDAK HADIR							
18	Diah Fizriah, S.E	Analisis Kerjasama								
19	Siti Aisyah, S.E.	Analisis Kerjasama	1	0.75	1.25	1.25	1	5.25	5	86
20	Rosalina, A.Md.	Pengadministrasi Umum	0.75	0.75	1	0.75	0.75	4	5	78
21	Muh. Deri Saputra	Pengadministrasi Umum	1	1	1	0.75	0.75	4.5	5	80

Keterangan:

	Memenuhi / melebihi standar kompetensi jabatan
	Belum memenuhi standar kompetensi jabatan

DAFTAR PELATIHAN

No.	NAMA PELATIHAN	TANGGAL PELATIHAN
1.	Capacity Building Training	September 20xx
2.	Team Building Training	Oktober 20xx
3.	Public Speaking Training	Oktober 20xx
4.	Achievment Motivation Training	November 20xx
5.	Service Excellent Training	Desember 20xx
6.	Self Improvement Training	September 20xx
7.	Innovation & Creativity Training	November 20xx
8.	Decision Making Training	Desember 20xx
9.	Diversity Training	September 20xx



PEMERINTAH PROVINSI BORNEO TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Meruya No 17 - Bernaung

Telpon 0456 – 765890 email : bapelitbang.borteng@mail.com

Bernaung, 1 September 202X

Kepada

Nomor : 07/III.2-560/ BALITBANGDA /202X

Lampiran : 1 halaman

Perihal : Penilaian Indeks Inovasi Daerah 202X

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintah Provinsi
Borneo Tenggara

Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6/3857/SJ Tanggal 6 Juli 202X tentang Pengukuran Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan Innovative Government Award 202X, bersama ini diinformasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tujuan mengakselerasi pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Provinsi Borneo Tenggara yaitu mendorong penerapan *good governance* dalam tata pengelolaan pemerintahan, meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses inovasi dan layanan publik lainnya.
2. Berdasarkan Pasal 388 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah ditegaskan bahwa “Kepala daerah melaporkan inovasi daerah kepada Menteri Dalam Negeri” dan “Menteri melakukan penilaian inovasi daerah berdasarkan laporan dari kepala daerah”. Terhadap hasil penilaian inovasi daerah tersebut, diberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah;
3. Berdasarkan arahan Gubernur Borneo Tenggara, akan membentuk tim percepatan pelaporan inovasi daerah sehingga OPD terkait diharapkan dapat menyampaikan program inovasi sebagai fokus percepatan pembangunan.
4. Inovasi yang dapat diajukan dalam bentuk:
 - a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. Inovasi Pelayanan publik; dan/atau
 - c. Inovasi Daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Usulan program inovasi yang telah ditandatangani kepala OPD disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Borneo Tenggara selambat-lambatnya tanggal 7 September 202x.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA,

Dr. M. Kusbiantoro, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196709101995122001

LEMBAR DISPOSISI SEKDA			
Surat dari	: DPMPTSP PROV BORNEO TENGGARA	Diterima tgl	: 2 September 202X
		No. Agenda	: 04
No. Surat	: 03/DPMPTSP-145/202X	Sifat	:
Tgl. Surat	:	<input checked="" type="checkbox"/> Sangat segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia	
Perihal : Penolakan Lahan Investasi			
Diteruskan kepada Sdr :		Dengan hormat harap :	
<input checked="" type="checkbox"/> Ka. Biro Pemerintahan dan Otonomi <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dan seterusnya		<input checked="" type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran <input type="checkbox"/> Proses lebih lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasi/Konfirmasikan	
Catatan :			
<div><div>• <i>Tindak lanjuti</i></div><div>Sekretaris Daerah</div></div>			



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI BORNEO TENGGARA

Jl. Ayam no 5, Bernaung

Bernaung, 2 September 20XX

No :03/DPMPTSP – 145/20XX
Perihal : Penolakan Lahan Investasi
Lampiran : -

Kepada Yth.

Gubernur Provinsi Borneo Tenggara

Di –

Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Rencana Peningkatan Investasi Provinsi Borneo Tenggara 20XX dimana salah satu program prioritas utama adalah Rencana Pembangunan Pabrik yang memproduksi Ban berkualitas tinggi yang akan diproyeksikan sebagai Pabrik Ban Terbesar di Asia Tenggara. Program ini pun telah mendapatkan persetujuan kerjasama dengan salah satu calon Investor asing yang berasal dari Jepang. Pembangunan pabrik Ban ini direncanakan berlokasi di Tana Baru yang dinilai sebagai lokasi yang paling strategis karena terletak di daerah yang masih kaya akan Sumber Daya Alam yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan Ban serta berlokasi cukup jauh dari pemukiman warga. Namun pada proses pembebasan lahan tersebut ditemukan permasalahan yaitu penolakan dari pemangku masyarakat adat suku Tampun. Penolakan ini terjadi dikarenakan lokasi tersebut merupakan tanah adat yang dinilai suci secara turun temurun dan digunakan untuk upacara keagamaan suku Tampun. Dalam sepekan kedepan, suku Tampun juga akan mengadakan demo sebagai bentuk aspirasi mereka yang akan dilaksanakan di depan Kantor Gubernur Borneo Tenggara.

Dengan adanya permasalahan ini, maka rencana peningkatan investasi Provinsi Borneo Tenggara terancam gagal yang tentunya akan berdampak pada menurunnya perekonomian baik di Tana Baru sendiri maupun juga di lingkungan Provinsi Borneo Tenggara.

Oleh karena itu kami mohon kebijakan dan arahan dari Bapak Gubernur terhadap permasalahan ini.

KA. DPMPTSP

Suri Ariani Mahmud, ST., MM



PEMERINTAH PROVINSI BORNEO TENGGARA
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN

Jalan Gajah Wong Nomor 13 Borneo Tenggara
Telepon (0423) 54123 Fax. (0423) 54122

Website : www.biropem.borteng.prov.go.id Email: birop@bortengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Plt. Kepala Biro Pemerintahan
Dari : Kasubbag TU
Tanggal : 3 September 202X
Nomor : 086/TU/IX/BPEM/202X
Hal : Rencana aksi realisasi anggaran

Dengan hormat, bersama ini kami laporkan hasil monitoring dan evaluasi anggaran Biro Pemerintahan Triwulan III tahun 202X. Adapun rencana aksi realisasi anggaran disampaikan melalui Biro Administrasi Pimpinan paling lambat 5 September 202X.

Mengingatnya tenggat waktu yang singkat mohon kiranya pimpinan dapat memberikan arahan mengenai rencana aksi tersebut.

Demikian disampaikan, mohon arahan lebih lanjut, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.

Kasubbag TU
Biro Pemerintahan,

Muh. Agus Fahri, S.E

NIP. 197109281986091xxx

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	APBD TAHUN 202X		REALISASI TRIWULAN III		RENCANA AKSI
			TARGET CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	SERAPAN ANGGARAN	PROSENTASE	
	BIRO PEMERINTAHAN, PERBATASAN DAN OTDA						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Laporan Yang Disusun Sesuai Ketentuan					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah		Rp 1,023,762,500	Rp 307,128,750	70%	
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			Rp 5,221,722,250	Rp 5,221,722,250		
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan						
4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Berita Acara Penegasan Batas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur secara jelas dan pasti	5 Berita Acara	Rp 969,833,789	Rp 484,916,895	50%	
4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Kondusifitas Daerah	1 Laporan	Rp 817,258,236	Rp 441,319,447	46%	
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah						
4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Laporan Kedinasan Pejabat Negara	1 Laporan	Rp 506,047,500	Rp 136,632,825	73%	
4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 Laporan	Rp 1,164,783,475	Rp 465,913,390	60%	
4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Laporan	Rp 596,800,000	Rp 208,880,000	65%	
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah						
4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Jumlah Laporan Kerjasama Antar Pemerintah	24 Dokumen	Rp 405,934,000	Rp 198,907,660	51%	
4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Laporan Kerjasama Antar Badan Usaha/Swasta	24 Dokumen	Rp 407,346,500	Rp 162,938,600	60%	
4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	24 Dokumen	Rp 353,718,750	Rp 212,231,250	40%	